

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat isu-isu dan kondisi beberapa tahun ke belakang ini sangat miris rasanya, banyak organisasi perangkat daerah di Indonesia yang laporan keuangannya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian tetapi masih banyak kepala pemerintah daerah dan jajarannya yang tertangkap oleh komisi pemberantasan korupsi akibat melakukan kegiatan praktik yang tidak semestinya dilakukan.

Hal ini bisa kita lihat pada pemerintahan Kabupaten Kudus dimana laporan keuangan daerahnya kembali mendapatkan WTP yang diberikan oleh BPK RI perwakilan Jawa Tengah (<https://rmoljateng.com>). Tetapi pada kenyataannya kepala pemerintahan Kabupaten Kudus yaitu Bupati MT terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sebagai tersangka terkait kasus jual beli jabatan (<https://cnnindonesia.com>).

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani yang mengatakan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian tidak menjamin bebas dari tindakan korupsi. Predikat yang diberikan oleh BPK dari laporan keuangan dijadikan sebagai pertanda bahwasanya penyusunan laporan keuangan memenuhi standar, bukan berarti tidak ada korupsi atau bahkan bukan berarti tidak ada pemborosan (<http://finance.detik.com>).

Melihat kondisi seperti ini seharusnya pemerintah daerah lebih mendorong dan menekankan adanya suatu peningkatan berupa sistem yang kuat guna mendapatkan output laporan keuangan yang baik, akuntabel, dan terbebas dari kesalahan, hal ini yang kemudian direspon dan dipertegas oleh pemerintah pusat yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur sistem pengendalian pemerintah yang mengacu pada konsep pengendalian intern.

Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang kuat dan baik diharapkan mampu menciptakan peningkatan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dari sebelumnya. Sistem pengendalian internal pemerintah daerah adalah salah satu cara yang digunakan dalam mengawasi penggelapan. Akuntabilitas keuangan tidak bisa maksimal tanpa adanya pengawasan, maka diperlukannya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang mewujudkan efektivitas, dan efisiensi, pemerintahan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah sangat penting keberadaannya dan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena mempunyai peran yang sangat kompleks, sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk menunjang secara langsung bagi semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam pembuatan suatu laporan keuangan daerah.

Faktor ke dua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan disusun

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Rahma, 2017).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan berbasis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang keuangan negara juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Asfiryati, 2017).

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan daerah. Aksesibilitas itu sendiri sangat melekat pada pentingnya masyarakat dalam memperoleh kemudahan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan karena penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Putri, 2017).

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi di Indonesia di mulai pada tahun 2001 yang kemudian pelaksanaannya dilakukan secara berangsur-angsur hingga munculnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai titik munculnya otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah berjalan seiringan dengan desentralisasi fiskal, hal inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal membangun perekonomian daerahnya karena disamping adanya dana dari pemerintah pusat terdapat juga pemanfaatan desentralisasi itu sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah mulai dilaksanakan pada tahun 1999 ketika Indonesia menganut sistem pelaksanaan otonomi daerah dalam badan pemerintahannya yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya sektor perekonomian itu tidak terlepas dari adanya desentralisasi, desentralisasi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mendirikan pondasi yang kuat bagi suatu daerah dalam hal keuangan, yang mana pendanaan itu sendiri akan dapat diterima oleh penyedia dana investor dan kreditur jika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik, dengan demikian dalam konteks akuntabilitas pelaporan keuangan, daerah dapat mewujudkan kemandiriannya karena keuangan atau fiskal daerah sudah terdesentralisasi, dalam artian pemerintah daerah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah tersebut (Muraiya dan Nadirsyah, 2018).

Berlakunya otonomi daerah ini maka daerah diharapkan bisa dapat mandiri untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan dalam pelaksanaannya pemerintahan harus menjalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan agar dapat

memperoleh kinerja yang baik sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat diterima dengan wajar tanpa pengecualian (Purbasari dan Bawono, 2017).

Munculnya desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur, mengelola, dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya sehingga bisa menumbuhkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin terarah. Desentralisasi sangat berpengaruh pada mandiri atau tidaknya daerah tersebut, jika hal-hal tersebut diperhatikan oleh pemerintah daerah tentu masyarakat semakin percaya terkait kinerja dari pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yolanda (2018), terdapat beberapa perbedaan penelitian yaitu (1) penambahan variabel desentralisasi fiskal. Alasan menambah variabel desentralisasi fiskal karena desentralisasi fiskal mencerminkan sikap pemerintah daerah dalam menjalankan wewenang sebagaimana mengelola, mengatur, dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya sehingga pemerintah daerah bisa mandiri dan tidak ketergantungan kepada pemerintah pusat yang nantinya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat, oleh sebab itu dengan adanya wewenang ini kebanyakan pemerintah daerah cenderung mengabaikan per tanggung jawaban atau akuntabilitas pengelolaannya. Kemudian, (2) objek penelitian yang digunakan berbeda, dimana peneliti menggunakan objek penelitian pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian Yolanda (2018) menggunakan objek penelitian pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, serta adanya beberapa perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul: **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel *Moderating*” (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Kudus).**

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal.
2. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Variabel *moderating* yang dipakai dalam penelitian ini sistem pengendalian internal pemerintah.
4. Tempat Penelitian di OPD Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus di pengaruhi oleh penyajian laporan keuangan daerah?
3. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh aksesibilitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal?
5. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus?
6. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus?
7. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus?
8. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.
3. Mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.
4. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.
5. Mengetahui pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah di OPD Kabupaten Kudus.
6. Mengetahui Pengaruh antara penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah di OPD Kabupaten Kudus.
7. Mengetahui pengaruh antara aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah di OPD Kabupaten Kudus.
8. Mengetahui pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah di OPD Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Mengharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal terhadap terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel *moderating*.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk OPD Kabupaten Kudus

Peneliti mengharapkan bisa dipergunakan oleh OPD untuk acuan, panduan dalam hal menambah pengetahuan dan informasi terkait bagaimana membuat suatu laporan keuangan yang baik dan relevan dan terbebas dari kesalahan.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Peneliti mengharapkan bisa dipergunakan oleh pemerintah untuk acuan, serta panduan untuk mendukung pemberian suatu opini atau tingkat kewajaran dari laporan keuangan daerah.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan bisa dijadikan masyarakat untuk pedoman dan panduan untuk menilai kualitas kinerja dari pemerintah daerah.